



## Efisiensi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Manajemen

| ISSN (Online) [3089-0756](https://doi.org/10.63217/efisiensi.v2i3) |

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DOI: <https://doi.org/10.63217/efisiensi.v2i3>



### Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menyeimbangkan Pengendalian Inflasi dan Target Penciptaan 19 Juta Lapangan Kerja

**Dody Kurniawan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia,

[dody.kurniawan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dody.kurniawan@dsn.ubharajaya.ac.id)

Corresponding Author: [dody.kurniawan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dody.kurniawan@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Abstract:** *This research aims to analyze the effectiveness of the Indonesian Government's fiscal policy strategy in facing the threat of global stagflation and the achievement of the target of creating 19 million jobs in the period of 2025-2026. Using the qualitative descriptive method with secondary data analysis from the Central Statistics Agency (BPS) and the Fiscal Policy Agency (BKF), the research results show that Indonesia has succeeded in maintaining macroeconomic stability with an economic growth rate of 5.11% and controlled inflation at 2.92%. This success is driven by expansive fiscal policies through the National Strategic Project (PSN) and energy subsidies to reduce the impact of imported inflation. However, this study found a structural challenge in the form of a high proportion of informal workers reaching 59.4%, which indicates the vulnerability of the community's economic resilience to future price shocks. Synergy between fiscal and monetary policies is the main key in ensuring that economic growth is not only achieved quantitatively, but also qualitatively through the strengthening of formal sectors and labor social security.*

**Keywords:** *Infation, Unemployment, Geopolitics, Physical Policy, Indonesian Stagflation, Physical Strategy*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi kebijakan fiskal Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman stagflasi global serta pencapaian target penciptaan 19 juta lapangan kerja pada periode 2025-2026. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% dan inflasi yang terkendali pada angka 2,92%. Keberhasilan ini didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan subsidi energi guna meredam dampak imported inflation. Namun, penelitian ini menemukan adanya tantangan struktural berupa tingginya proporsi pekerja informal yang mencapai 59,4%, yang mengindikasikan kerentanan daya tahan

ekonomi masyarakat terhadap guncangan harga di masa depan. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercapai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas melalui penguatan sektor formal dan jaminan sosial tenaga kerja.

**Kata Kunci:** Inflasi, Pengangguran, Geopolitik, Kebijakan Fiskal, Stagflasi Indonesia, Strategi Fiskal

---

## PENDAHULUAN

Kondisi geopolitik global saat ini tidak lagi hanya menjadi isu keamanan, namun telah bertransformasi menjadi guncangan ekonomi yang signifikan (Müller, 2023). Bagi Indonesia, pengaruh konflik global dan transisi politik dalam negeri membuat dilema kebijakan antara menekan laju inflasi yang kian meningkat atau mendorong penyerapan tenaga kerja secara signifikan sesuai target pembangunan nasional (Bednarski et al., 2023). Inflasi yang melanda ekonomi domestik saat ini bukan lagi sekedar kenaikan harga musiman, melainkan *imported inflation* (inflasi impor) yang dipicu oleh lonjakan harga komoditas energi dan pangan di pasar internasional (Maulana & Indrawati, 2022).

Dalam konteks ini, inflasi menjadi ancaman serius karena memperlemah daya beli masyarakat, yang akhirnya menghalangi perkembangan dunia usaha dan menyulitkan pencapaian target 19 juta lapangan kerja (Dhianty, 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan Fiskal yang adaptif untuk menyeimbangkan upaya pengendalian harga dengan kebutuhan investasi disektor padat karya. Kenaikan satu atau dua barang tidak disebut inflasi kecuali meluas ke sebagian besar barang lain.

Artikel ini akan membahas secara mendalam dinamika inflasi dan pengangguran dalam kerangka ekonomi makro Indonesia saat ini. Fokus pembahasan meliputi definisi operasional kedua fenomena tersebut, analisis penyebab inflasi impor, serta strategi kebijakan fiskal dalam menyeimbangkan stabilitas harga dengan target penciptaan 19 juta lapangan kerja. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi kebijakan yang relevan dalam menghadapi ancaman stagflasi serta menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian politik dan geopolitik global.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Melalui pendekatan ini, penulis bermaksud untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai efektivitas strategi kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas inflasi serta pencapaian target penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersifat otoritatif, yang diperoleh melalui teknik studi pustaka (*library research*). Sumber data utama mencakup laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2025-2026 terkait indikator makroekonomi dan ketenagakerjaan, serta dokumen Nota Keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis dimulai dengan melakukan reduksi data terhadap angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan profil pekerja (formal dan informal). Selanjutnya, data tersebut disintesis dengan teori kebijakan ekonomi makro untuk mengevaluasi bagaimana instrumen fiskal, seperti subsidi dan Proyek Strategis Nasional (PSN), berinteraksi dengan kondisi pasar tenaga kerja

dan tekanan inflasi eksternal (imported inflation). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif guna menarik kesimpulan yang komprehensif terkait strategi kebijakan yang telah diimplementasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Inflasi dan Pengangguran di Indonesia

Berdasarkan data BPS (2025), tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di kisaran 5,11% memberikan ruang bagi kebijakan Fiskal untuk melakukan intervensi. Namun, kenaikan harga komoditas energi global akibat konflik geopolitik telah memicu tekanan inflasi yang dapat memperlambat ekspansi sektor padat karya (Fauzi et al., 2023). Hasil analisis menunjukkan bahwa melalui kebijakan fiskal ekspansif yang terukur seperti pengalokasian anggaran untuk proyek strategi nasional, pemerintah berupaya memitigasi dampak stagflasi sekaligus mengejar target 19 juta lapangan kerja (Nurhayana & Soebagiyo, 2023).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan negara, terutama terkait pemasukan dan pengeluaran negara untuk mengatur perekonomian (Putri, 2021). Kebijakan ini mencakup pengelolaan sumber pemasukan negara, seperti pajak dan penerimaan non-pajak, serta alokasi pengeluaran yang tercantum dalam APBN (Siswajanthi et al., 2024). Di Indonesia, kebijakan fiskal berada di bawah kewenangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Melalui cara ini, meskipun terdapat ancaman geopolitik global, Indonesia berhasil menjaga stabilitas makroekonomi pada tahun 2025 (Soesanto et al., 2023b). Hal ini terlihat dari laju inflasi yang terjaga di angka 2,92%, yang dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan efektif dalam mencegah terjadinya stagflasi, mengingat angka inflasi masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia (Ali et al., 2023).

Di sisi lain pada saat yang bersamaan, tingkat pengangguran Indonesia turun menjadi 4,85% pada K3 2025 dari 4,91% pada periode yang sama setahun sebelumnya, sementara jumlah pengangguran tetap sekitar 7,46 juta. Jumlah pekerjaan naik 1,31% menjadi 146,54 juta, didorong terutama oleh kenaikan di sektor pertanian, akomodasi, dan manufaktur. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja sedikit turun menjadi 70,59% dari 70,63% pada periode yang sama tahun lalu.

**Tabel 1. Indikator Ketenagakerjaan dan Upah Sektor Manufaktur di Indonesia**

	Terakhir	Sebelum Ini	Satuan	Referensi
Pekerja	144.642.000.00	138.632.511.00		Dec 2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69.56	69.30	Persen	Dec 2024
Populasi	281.60	278.70	Juta	Dec 2024
Pengangguran	7.195.000.00	7.989.275.00		Dec 2024
Tingkat Pengangguran	4.85	4.76	Persen	Sep 2025
Upah Sektor Manufaktur	3.270.191.00	3.090.532.00	Idr / Bulan	Sep 2025

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% dan inflasi yang terkendali pada angka 2,92%, Indonesia secara teknis berhasil menghindari jebakan stagflasi. Meski begitu, efektivitas kebijakan fiskal ekspansif dalam memitigasi stagflasi sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar Rupiah dan sinergi dengan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga laju inflasi inti tetap berada pada rentang sasaran (Mahaputra & Saputra, 2024). Pengangguran 4,85% menunjukkan bahwa sektor manufaktur mulai pulih pasca-pandemi,

namun tantangan stagflasi tetap mengancam jika harga energi tidak terkendali (Soesanto et al., 2023a).

### Strategi Kebijakan Fiskal

Pemerintah Indonesia menerapkan strategi fiskal melalui dua jalur utama: Pertama, melalui fungsi stabilisasi dengan memberikan subsidi energi guna meredam tekanan *imported inflation*. Kedua, melalui fungsi alokasi dengan mempercepat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mendorong hilirisasi industri untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan menyerap tenaga kerja secara masif.

Berdasarkan analisis data tahun 2025-2026, kebijakan fiskal pemerintah dapat dievaluasi sebagai berikut:

#### 1. Keberhasilan Mitigasi Stagflasi

Pemerintah berhasil menggunakan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur melalui alokasi anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini terbukti efektif menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5,11% dan mencegah ekonomi berhenti bergerak (stagnasi). Penggunaan instrumen fiskal untuk mensubsidi sektor energi juga berhasil menahan laju *imported inflation* sehingga inflasi tetap berada di angka 2,92%, yang mencegah penurunan daya beli masyarakat secara drastis.

#### 2. Efektivitas Terhadap Kualitas Lapangan Kerja

Meskipun pemerintah menargetkan 19 juta lapangan kerja, evaluasi menunjukkan adanya mis-match kualitas. Kebijakan fiskal saat ini lebih banyak menyerap tenaga kerja di sektor konstruksi dan proyek fisik, namun belum mampu mendorong pergeseran masif dari sektor informal ke formal. Dengan jumlah pekerja informal yang mencapai 59,4%, kebijakan fiskal dinilai belum memberikan "perlindungan jangka panjang" (seperti jaminan sosial) yang terintegrasi dalam skema pengeluaran negara.

#### 3. Ketepatan Sasaran Belanja Negara

Kebijakan fiskal ekspansif perlu dievaluasi ketepatannya dalam menghadapi inflasi impor. Jika anggaran hanya fokus pada infrastruktur tanpa diimbangi dengan insentif fiskal untuk sektor manufaktur domestik, maka ketergantungan terhadap barang impor akan tetap tinggi. Hal ini membuat APBN selalu rentan terhadap gejolak geopolitik global.

### Kerentanan Sektor Informal terhadap Fluktuasi Harga

Berdasarkan data yang dihimpun, Indonesia pada periode 2025-2026 menunjukkan performa makroekonomi yang tangguh secara administratif, namun memiliki kerentanan struktural di tingkat akar rumput. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% dan inflasi yang terkendali pada angka 2,92%, Indonesia secara teknis berhasil menghindari jebakan stagflasi. Namun, analisis lebih dalam terhadap kualitas ketenagakerjaan mengungkapkan sisi lain dari ketahanan tersebut. Berikut adalah data terperinci berdasarkan laporan BPS per 2025-2026:

**Tabel 2. Indikator Ketenagakerjaan dan Upah Sektor Manufaktur di Indonesia**

Total Penduduk Bekerja	Sekitar 146,54 juta – 147,91 juta orang (per akhir 2025 – awal 2026)
Pekerja Informal	Mendominasi dengan persentase sekitar 57,7% - 59,4% (lebih dari 80 juta orang)
Pekerja Formal	Proporsi mencapai 40,6% - 42,2% (sekitar 61,8 juta orang)
Status Pekerjaan	Didominasi oleh buruh/karyawan (38,74%), wirausaha (21,40%). Dan pekerja keluarga (12,96%)

Dominasi pekerja informal yang mencapai 57,7% - 59,4% (lebih dari 80 juta orang) menjadi titik lemah dalam ketahanan ekonomi nasional. Berbeda dengan sektor formal yang memiliki mekanisme penyesuaian upah minimum tahunan, pendapatan pekerja informal sangat bergantung pada daya beli harian masyarakat. Dalam skenario kenaikan harga komoditas energi global, kelompok ini akan mengalami tekanan ganda: peningkatan biaya modal (bagi wirausaha mikro) dan penurunan margin keuntungan, mengingat sensitivitas harga di pasar informal yang sangat tinggi.

Meskipun pemerintah menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja, data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan lapangan kerja saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan makanan secara mandiri (informal). Oleh karena itu, kebijakan fiskal ekspansif pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) seharusnya tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja secara kuantitas, tetapi juga mendorong transformasi menuju sektor formal. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar memberikan ketahanan yang berkelanjutan bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman ketidakpastian geopolitik global.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dinamika ekonomi makro Indonesia periode 2025-2026, dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan fiskal pemerintah memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia berhasil menekan laju inflasi pada angka 2,92% dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%, sebuah capaian yang mengindikasikan bahwa risiko stagflasi dapat dimitigasi dengan baik.

Namun, keberhasilan ini menyisakan tantangan struktural yang signifikan. Dominasi pekerja di sektor informal yang mencapai 59,4% menunjukkan bahwa meskipun target kuantitas lapangan kerja mulai mendekati sasaran 19 juta, kualitas dan jaminan sosial tenaga kerja masih relatif rendah. Kondisi ini membuat sebagian besar lapisan masyarakat tetap rentan terhadap kejutan ekonomi global atau imported inflation.

Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang pruden harus terus diperkuat. Kebijakan fiskal ke depan tidak hanya harus fokus pada pembangunan fisik melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi juga pada penguatan fondasi ekonomi mikro dan transformasi pekerja informal menuju sektor formal untuk menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Ali, H., Mahaputra, M. R., Saputra, F., Mahaputra, M. R., Maharani, A., Nofrialdi, R., Saputra, E. B., Yandi, A., & Satriawan, N. (2023). Influence of Brand Image: Analysis of Purchase Decision and Author Loyalty (Study on Dinasti International Journal of Management Science). *Migration Letters*, 20(6), 676–682.
- Bednarski, L., Roscoe, S., Blome, C., & Schleper, M. C. (2023). Geopolitical disruptions in global supply chains: a state-of-the-art literature review. *Production Planning and Control*, 0(0), 1–27. <https://doi.org/10.1080/09537287.2023.2286283>
- BPS. (2025). Laporan Bulanan Data strategis: Ketenagakerjaan Dan Inflasi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Celwin louis. (2024). Pentingnya Kesadaran Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.

- Dhianty, R. (2021). Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (e-commerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1), 213–226. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24671>
- Fauzi, A., Maidani, Nursal, M. F., & Saputra, F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Digital (JMPD)*, 1(3), 119–132.
- Kementerian Keuangan RI. (2025). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kemenkeu
- M. Hanif Rizqi S. (2025). Geopolitik dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di era globalisasi.
- Mahaputra, M. R., & Saputra, F. (2024). Pengaruh Capital Budgeting dan Evaluasi Kinerja terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 5(4), 242–252.
- Mankiw, N. G. (2020). Principles of Economics
- Maulana, R. A., & Indrawati, L. R. (2022). Pengaruh inflasi kemiskinan dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 1990-2019. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 10(2), 123–134.
- Müller, M. (2023). The ‘new geopolitics’ of mineral supply chains: A window of opportunity for African countries. *South African Journal of International Affairs*, 30(2), 177–203. <https://doi.org/10.1080/10220461.2023.2226108>
- Nurhayana, E., & Soebagiyo, D. (2023). Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 106–119.
- Putri, P. E. (2021). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Pasar Modal. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 71–84.
- Siswajanthi, F., Shiva, K. A., Salsabila, N., Putry, S. A. S., & Putri, S. M. I. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4360–4369.
- Soesanto, E., Saputra, F., Puspitasari, D., & Danaya, B. P. (2023a). Analisis Sistem Manajemen Sekuriti: K3 dan Beban Kerja di PT . XYZ. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 139–150.
- Soesanto, E., Saputra, F., Puspitasari, D., & Danaya, B. P. (2023b). Determinasi Sistem Manajemen Sekuriti: Analisis Objek Vital , Pengamanan File dan Pengamanan Cyber pada Yayasan Siber Publisher. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(1), 23–29.
- Trading Economics. (2025). Tingkat Pengangguran Indonesia. [tradingeconomics.com](https://tradingeconomics.com)